**Jurnal Pendidikan Indonesia:**
**Teori, Penelitian dan Inovasi**
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jpi.v6i1.2597
Vol. 6, No. 4, Juli 2026

# ANALISIS PENERAPAN NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA: STUDI KUALITATIF

**Nasywa Nurul Azkiya[1], Muhammad Ghiyats Zainul Ghassan[2], Salma Nur Asy Syifa[3], Khodijah Fitria[4], Ritonga Muhammad Farrel Halomoan Prandyatama[5] & Supriyono[6]**

[1,2,3,4,5,6] Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia, 40154

Telp: (022) 2013163, Fax: (022) 2001135

E-mail: nasywana@student.upi.edu[1], muhammadghiyats@student.upi.edu[2], Salmanas2806@gmail.com[3], khodijahfitria252@student.upi.edu[4], farrelritonga@gmail.com[5], Supriyono@upi.edu[6]

**RIWAYAT ARTIKEL**
*Received : 2026-07-11*
*Revised : 2026-07-24*
*Accepted : 2026-07-29*

***KEYWORDS***
*Inclusive Education*
*Pancasila Values*
*Higher Education*
*Students with Disabilities*

**KATA KUNCI**
Pendidikan Inklusif
Nilai-Nilai Pancasila
Pendidikan Tinggi
Mahasiswa Disabilitas

***ABSTRACT***

*Inclusive education is an educational system that ensures everyone receives equal and fair access to learning, including students with disabilities. However, its implementation in Indonesian higher education institutions still faces various challenges, such as structural, cultural, and methodological barriers. The values of Pancasila particularly humanity, unity, and social justice are relevant as moral and ethical foundations. This study evaluates the implementation of inclusive education at Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) by emphasizing the role of Pancasila values in creating an inclusive academic environment. Using a descriptive qualitative approach, the study involved participants consisting of one lecturer, one student with disabilities (categorized as having physical and sensory disabilities), and two non-disabled students. Data were collected through in-depth interviews, classroom observations, and documentation studies, and were analyzed using thematic analysis. Data validity was ensured through source triangulation and member checking. The results indicate that the academic community perceives Pancasila as the moral foundation of inclusive education and provides instrumental, emotional, and academic support through mentoring, flexibility in assignments, and service policies. However, the implementation has not been evenly distributed across all faculties, due to limited accessibility facilities, learning media that are not disability-friendly, a lack of sign language interpreters, and insufficient training for lecturers. A gap is evident between normative understanding and the practical realization of social justice in fulfilling the academic rights of students with disabilities.This study concludes that the implementation of inclusive education at UPI operates at a normative level but has not yet reached optimal practice. Therefore, strengthening institutional policies, enhancing lecturers' competencies, providing physical and digital accessibility facilities, and continuously internalizing Pancasila values are necessary to realize higher education that is just, humane, and sustainable. The main contribution of this study is to offer practical recommendations for Indonesian higher education institutions to improve the implementation of inclusive education by reinforcing Pancasila values as an ethical and moral foundation.*

**ABSTRAK**

Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan setiap orang mendapatkan hak belajar secara adil, termasuk mahasiswa disabilitas, namun,

penerapannya di perguruan tinggi Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti struktural, budaya, dan metodologis. Nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, relevan sebagai dasar moral dan etika. Penelitian ini mengevaluasi implementasi pendidikan inklusif di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan menekankan peran nilai-nilai Pancasila dalam menciptakan lingkungan akademik yang inklusif. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian melibatkan subjek terdiri dari 1 dosen, 1 mahasiswa disabilitas (berkategori fisik, sensorik), dan 2 mahasiswa non-disabilitas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi perkuliahan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan member checking. Hasil menunjukkan civitas akademika memaknai Pancasila sebagai fondasi moral pendidikan inklusif, memberikan dukungan instrumental, emosional, dan akademik melalui pendampingan, fleksibilitas penugasan, serta kebijakan layanan. Namun, implementasi belum merata ke seluruh fakultas, dengan keterbatasan fasilitas aksesibilitas, media pembelajaran yang kurang ramah disabilitas, minimnya juru bahasa isyarat, dan kurangnya pelatihan bagi dosen. Terlihat adanya Kesenjangan antara pemahaman normatif dan praktik keadilan sosial dalam memenuhi hak hak akademik mahasiswa disabilitas. Penelitian ini menyimpulkan implementasi pendidikan inklusif di UPI berjalan normatif namun belum optimal, sehingga diperlukan penguatan kebijakan institusional, peningkatan kompetensi dosen, penyediaan fasilitas aksesibilitas fisik dan digital, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila yang berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang adil, humanis, dan berkelanjutan. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan rekomendasi praktis bagi perguruan tinggi Indonesia untuk meningkatkan implementasi pendidikan inklusif melalui penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan yang etis dan moral.

## 1. Pendahuluan

Pendidikan inklusif merupakan kerangka pendidikan yang menjamin realisasi hak setiap individu untuk belajar secara adil dan tanpa diskriminasi berdasarkan karakteristik fisik, status sosial, atau kemampuan. Dalam penelitian ini, pendidikan inklusif dipahami sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dalam lingkungan belajar bersama melalui penyesuaian layanan sesuai kebutuhan masing-masing. Pendekatan ini berperan penting dalam membangun keadilan sosial dan mendorong pembangunan manusia berkelanjutan.

Meskipun pendidikan inklusif telah menjadi prioritas nasional di Indonesia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pendidik belum memiliki kompetensi dalam pedagogi inklusif, infrastruktur pendukung belum memadai, dan sumber daya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus masih terbatas (Juntak et al., 2023). Selain itu, pemahaman yang terbatas di antara para guru mengenai gaya belajar yang beragam, terutama dalam kaitannya dengan dimensi agama, semakin menghambat pencapaian efektif dari tujuan yang terkait dengan pendidikan inklusif.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendidikan inklusif cenderung lebih berhasil di wilayah perkotaan yang memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur memadai. Sebaliknya, lembaga pendidikan di daerah dengan keterbatasan sumber daya masih menghadapi berbagai kendala, baik struktural maupun sosial. Stigma terhadap siswa berkebutuhan khusus serta rendahnya penerimaan masyarakat terhadap keragaman memperburuk ketimpangan praktik inklusi (Isnawati et al., 2025; Sari et al., 2022). Hasil yang berbeda ini menyebabkan perbedaan pendapat mengenai hal apa yang paling mempengaruhi keberhasilan pendidikan inklusif di antara jumlah sumber daya yang ada atau kuatnya prinsip sosial dan moral yang melekat di lingkungan pendidikan.

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip dasar Pancasila menjadi landasan hukum yang relevan untuk mendorong praktik pendidikan inklusif. Cita-cita kemanusiaan, kesetaraan sosial, dan persatuan merangkum pentingnya menghargai martabat manusia dan memahami bahwa keragaman

merupakan bagian penting dari kehidupan nasional dan sipil. Dianggap bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem pendidikan tinggi dapat membantu menciptakan lingkungan akademik yang inklusif melalui kebijakan institusional, rencana pembelajaran, dan interaksi sosial yang menghormati kesetaraan dan non-diskriminasi.

Menurut penelitian sebelumnya, keberhasilan pendidikan inklusif seringkali bergantung juga pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap keberagaman dan bukan hanya mengenai kualitas guru serta fasilitas (Biantoro, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan inklusif berada pada moral dan nilai bukan hanya masalah teknis saja. Namun, tidak banyak penelitian yang melihat bagaimana Pancasila berfungsi sebagai dasar moral untuk menerapkan pendidikan inklusif di tingkat perguruan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengisi celah tersebut dengan lebih mendalami Pancasila dalam mengimplementasikan fungsinya sebagai dasar nilai moral dan sosial dalam konteks inklusivitas di perguruan tinggi yang dalam penelitian ini terfokus pada UPI.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan subjek terdiri atas mahasiswa UPI, baik yang memiliki disabilitas maupun tidak, serta para dosen. Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, dan instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara semi-terstruktur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk pembangunan pendidikan tinggi yang lebih adil, humanis, dan inklusif. Data dikumpulkan secara sistematis dan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi cara nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam praktik pendidikan inklusif.

Terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini, di antaranya bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan pendidikan inklusif di UPI, nilai-nilai Pancasila apa saja yang paling berperan dalam membangun lingkungan akademik yang inklusif di UPI, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan pendidikan inklusif berbasis nilai-nilai Pancasila di lingkungan UPI. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan pendidikan inklusif di UPI, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang paling berpengaruh dalam menciptakan suasana akademik yang inklusif, adil, dan menghargai keberagaman, serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pendidikan inklusif berbasis nilai-nilai Pancasila di lingkungan UPI.

## 2. Tinjauan Literatur

Pendidikan inklusif dipahami tidak hanya sebagai pendekatan teknis dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga sebagai praktik yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Asmiati et al., (2023) menekankan bahwa pendidikan inklusif menjamin akses dan partisipasi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi, sehingga mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan.

Beberapa kajian terdahulu di Indonesia telah mendalami berbagai dimensi inklusif, seperti kebijakan nasional, hambatan dan tantangan yang dihadapi, serta praktik pelaksanaannya. Isnawati et al. (2025) dalam studinya menyimpulkan bahwa penerapan pendidikan inklusif masih seringkali menghadapi berbagai tantangan meskipun kerangka regullasi kebijakannya telah ditetapkan di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep inklusivitas belum sepenuhnya diintegrasikan dalam kegiatan pendidikan harian. Kondisi ini menggarisbawahi bahwa pendidikan inklusif merupakan praktik yang mengandung nilai-nilai moral dan sikap serta pandangan masyarakat, terutama para akademisi.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila berperan penting sebagai penguat dalam pendidikan inklusif dari segi fondasi moral dan ideologisnya. Di antara nilai yang sangat terkandung dalam konsep inklusivitas adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan penghormatan terhadap martabat individu tanpa diskriminasi. Selain itu, nilai keadilan sosial juga termasuk yang terkandung di dalam konsep pendidikan inklusif, karena nilai ini menegaskan pentingnya pemerataan akses serta pelayanan pendidikan bagi seluruh warga negara, terutama peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek kebijakan dan layanan, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan Pancasila sebagai landasan moral dalam praktik pendidikan inklusif di perguruan tinggi.

Meskipun kajian mengenai pendidikan inklusif di Indonesia terus berkembang, namun masih sedikit sekali yang membahas terkait pendidikan inklusif di perguruan tinggi. Padahal, pendidikan di tingkat perguruan tinggi memiliki kebijakan yang jauh berbeda dibanding pendidikan dari pendidikan sebelumnya. Saat menjadi mahasiswa, tuntutan yang didapat jauh lebih berat dan sistem akademiknya pun jauh lebih kompleks. Sehingga, kurangnya

penelitian terhadap konsep inklusivitas di perguruan tinggi terkadang menjadi tantangan sendiri bagi warga universitas, terutama para penyandang disabilitas, karena menunjukkan ketidakmerataan pemahaman dan penerapan konsep inklusivitas di jenjang perguruan tinggi.

Selain itu, penelitian mengenai hubungan antara pendidikan inklusif dan nilai-nilai Pancasila juga masih sangat minim. Sebagian besar kajian lebih mendalami terkait isu pelayanan dan kebijakan institusional tanpa menghubungkan kepada nilai-nilai moral yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Padahal, esensi dari pendidikan inklusif itu sendiri adalah nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan yang ada di dalam Pancasila. Keterbatasan ini mengungkapkan adanya kesenjangan penelitian yang penting untuk diatasi, khususnya dalam memahami internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan, praktik akademik, dan interaksi sosial di lingkungan kampus guna membangun pendidikan inklusif yang adil dan humanis. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan diri sebagai upaya untuk melengkapi dan memperkaya kajian sebelumnya dengan menganalisis penerapan pendidikan inklusif di UPI dari perspektif nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini tidak hanya menyoroti kebijakan dan fasilitas, tetapi juga menggali pengalaman mahasiswa disabilitas serta peran civitas akademika dalam menginternalisasi nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial dalam kehidupan akademik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan pendidikan tinggi yang inklusif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

## 3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, dan praktik civitas akademika dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila pada pendidikan inklusif di UPI. Pendekatan ini dipilih karena mengeksplorasi sejauh mana UPI menerapkan pendidikan inklusif dengan baik, hambatan yang dihadapi, dan saran untuk memperbaiki dan mengembangkan pendidikan inklusif di UPI agar tetap sejalan dengan nilai-nilai pancasila. Studi tersebut dilakukan di UPI. Subjek penelitian meliputi dosen, mahasiswa disabilitas, dan mahasiswa non-disabilitas yang terlibat langsung dalam aktivitas akademik inklusif. Pemilihan subjek ini didasarkan pada keterlibatan dalam praktik pendidikan inklusif serta pengalaman langsung dalam interaksi akademik di lingkungan UPI. Informasi penelitian dipilih berdasarkan keterlibatan informan, pengalaman, dan pengetahuan mereka tentang penerapan prinsip-prinsip pancasila dan berbagai masalah pendidikan inklusif di UPI.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam untuk menggali pandangan dan pengalaman informan, observasi perkuliahan untuk mengamati praktik pendidikan inklusif secara langsung, serta studi dokumentasi untuk menelaah kebijakan dan fasilitas pendukung yang disediakan oleh UPI. Kemudian, dilakukan juga observasi di lapangan untuk mengamati secara langsung kegiatan perkuliahan bagi para mahasiswa disabilitas. Terakhir, dokumentasi sederhana yang mencakup fasilitas-fasilitas yang disediakan UPI bagi para mahasiswa disabilitas. Berikut ini kisi-kisi pedoman wawancara yang dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian:

**Tabel 1.** Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

| No | Aspek yang akan diwawancara | Ruang Lingkup | Butir |
|---|---|---|---|
| 1 | Identitas Responden | Posisi dan peran narasumber di UPI | A1, B1, C1 |
| | | Disabilitas apa yang dialami | B2 |
| | | Bantuan yang diberikan saat perkuliahan | C2 |
| | | Koordinasi dengan dosen terkait kebutuhan teman disabilitas | C3 |
| 2 | Pemahaman Pancasila & Pendidikan Inklusif | Pemahaman hubungan nilai Pancasila dengan pendidikan inklusif | A2, C4 |
| | | Identifikasi nilai Pancasila yang relevan dalam pembelajaran inklusif | A3, C5 |
| 3 | Praktik Pembelajaran Inklusif | Penerapan nilai Pancasila dalam pembelajaran inklusif | A4, C6 |
| | | Pengalaman pembelajaran inklusif | B3 |
| | | Interaksi mahasiswa disabilitas dengan dosen | B4 |
| 4 | Adaptasi Pembelajaran | Penyesuaian metode dan media pembelajaran bagi | A5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | mahasiswa disabilitas | |
| | | Aksesibilitas fasilitas bagi mahasiswa disabilitas | B5 |
| 5 | Dukungan Akademik Inklusif | Bentuk dukungan dosen kepada mahasiswa disabilitas | A6 |
| | | Dukungan kampus dan layanan pendukung bagi mahasiswa disabilitas | A7, B6 |
| | | Dukungan sosial yang diberikan kepada mahasiswa disabilitas | C7 |
| 6 | Hambatan dan Tantangan Implementasi | Hambatan dan tantangan selama pembelajaran inklusif | A8, B7 |
| | | Hambatan akademik dan sosial yang diamati | C8 |
| 7 | Kebutuhan Institusional | Kebutuhan pelatihan, fasilitas, dan kebijakan pendukung | A9 |
| 8 | Evaluasi Institusi untuk Pelayanan Inklusif | Penilaian keberhasilan UPI dalam penerapan nilai Pancasila secara inklusif | A10, C9 |
| | | Kualitas layanan | B8 |
| | | Efektivitas dukungan | B9 |
| | | Kepuasan pengguna layanan | B10 |
| 9 | Harapan & Rekomendasi | Saran pengembangan kampus inklusif berbasis nilai Pancasila | A11, C10 |
| | | Perbaikan sistem dan kebijakan | B11 |

Keterangan : A = Wawancara untuk dosen
B = Wawancara untuk mahasiswa disabilitas
C = Wawancara untuk mahasiswa non-disabilitas

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri yang bertanggung jawab untuk merencanakan penelitian, membuat prosedur penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisanya. Peneliti menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi gambar untuk membantu proses pengumpulan data. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis melalui analisis kualitatif, yang dilakukan dalam tiga tahap. Analisis ini meliputi pemilihan dan pemfokusan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, penyusunan data dalam bentuk narasi deskriptif dan pengelompokan tema, dan penciptaan makna dan pola dari data untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yang membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keabsahan data. Selain itu, member checking juga dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa data itu akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

## 4. Hasil

### Pemahaman dan Penerapan Nilai Pancasila dalam Praktik Pendidikan Inklusif

Dari hasil wawancara, semua informan melihat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar penting untuk membuat pendidikan yang inklusif di Universitas Pendidikan Indonesia. Mahasiswa dengan disabilitas memahami Pancasila sebagai jaminan untuk menghormati martabat manusia dan kesetaraan hak dalam mendapatkan pendidikan. Sementara itu, dosen dan mahasiswa non-disabilitas menggunakan Pancasila sebagai panduan moral untuk saling menghormati, menerima perbedaan, dan membangun kebersamaan di kampus.

Hal ini tercermin dalam ungkapan mereka dalam wawancara, “Direalisasikannya sudah ada, tetapi untuk diimplementasikan sepenuhnya belum. Dan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab itu belum, karena masih banyak disabilitas yang terhambat di UPI.” (mahasiswa disabilitas, wawancara, 2025), "Pendidikan inklusif merupakan pendidikan dengan tanpa adanya diskriminasi, untuk siapapun itu. Hubungannya dengan Pancasila jelas, mengacu pada Undang-Undang (UU). Ada juga UU yang mengatakan bahwa menerima pendidikan adalah hak setiap individu. Dulu mah hanya Sekolah Luar Biasa (SLB) saja, tapi sekarang semua instansi pendidikan harus mengadakan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini ada kaitannya dengan nilai no.1,2,3,4,5." (dosen UPI, wawancara, 2025), "Menurut saya sendiri nilai pancasila yang berhubungan dengan membantu teman disabilitas adalah sila kedua, karena saya merasa dengan kita membantu teman yang disabilitas, kita jadi bisa saling peduli dan mengasihi, tidak membeda bedakan, dan mengakui

martabat mereka sebagai manusia juga." (Mahasiswa non-disabilitas, wawancara, 2025).

**Dukungan Sosial dan Peran Sivitas Akademika**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial untuk mahasiswa disabilitas di kampus sudah mulai muncul dan terus mengalami peningkatan, tidak hanya di kegiatan akademik, tetapi juga dalam kegiatan non-akademik. Mahasiswa non-disabilitas biasanya membantu temannya yang disabilitas dalam pengerjaan tugas, mobilisasi, dan komunikasi dengan dosen ataupun tenaga pendidik lainnya.

Selain bantuan praktis, mahasiswa non-disabilitas ataupun dosen seringkali memberikan dukungan emosional dengan memberikan semangat, mendengarkan keluhan, serta membuat suasana pembelajaran menjadi lebih hangat, nyaman, dan semakin inklusif. Selain itu, dosen biasanya juga memberikan bantuan dengan melakukan sesi konseling serta memberikan dispensasi dalam pengerjaan tugas kepada mahasiswa disabilitas.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh mahasiswa disabilitas dan non-disabilitas, "Pengalaman yang berkesan ketika selalu di bantu oleh teman-teman dan dosen, dalam bermobilisasi, hal akademik, ketika ada event akan selalu dibantu, Dan ditanyakan, apakah kondisi baik dan keperluan yang di butuhkan nya, teman-teman dan dosen sangat mengerti diri saya." (wawancara, 2025), "mungkin dengan mencoba untuk membantu. Dan saya sendiri jika ada kesempatan Itu mendengarkan curhatan dan keluh kesah mereka dalam berkuliah.

Penerimaan teman disabilitas di lingkungan kampus itu cukup beragam, akan tetapi jika di prodi kami sendiri yang sangat erat hubungan nya dengan disablilitas dan inklusif, rasa nya kami sudah cukup menerima dan merangkul teman-teman disabliitas. Akan tetapi saya sendiri memiliki teman disabilitas yang beda prodi, menceritakan bahwa pernah mengalami, pengalaman yang tidak mengenakan dari teman-teman sekelas nya." (wawancara, 2025).

**Hambatan dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif**

Upaya penerapan sudah seringkali dilakukan, namun masih banyak sekali hambatan yang dihadapi oleh warga kampus dalam konteks pendidikan inklsuif. Hambatan itu sendiri terbagi menjadi hambatan dalam bidang akademik dan bidang non-akademik.

Di dalam bidang akademik, seringkali didapati bahwa mahasiswa disabilitas maupun mahasiswa non-disabilitas yang membantunya merasakan kesulitan dalam pembelajaran. Hal itu disebabkan oleh kebanyakan materi yang diberikan adalah materi visual tanpa penjelasan lisan yang menghambat mahasiswa disabilitas tunanetra, lalu kurangnya penerjemah bahasa isyarat di lingkungan UPI sehingga mempersulit pembelajaran bagi teman tuli, serta beberapa bahan ajar yang masih sulit diakses. Selain itu, hambatan non-akademik juga masih seringkali dihadapi sehingga mempersulit mobilitas bagi mahasiswa disabilitas. Diantaranya adalah guiding block yang tidak sesuai standar dan akses perpustakaan serta gedung kuliah yang masih sulit dikarenakan tidak semua lift didesain ramah untuk beberapa tipe mahasiswa disabilitas yang menjadi penghambat gerak harian mahasiswa disabilitas di kampus.

Hal ini diutarakan langsung oleh mahasiswa penyandang tunanetra, "bagi mahasiswa disabilitas untuk fasilitas masih belum memadai, seperti di fakultasnya sendiri blindding blok itu hanya sampai lantai 3, tidak ada lift berbunyi atau *braille* untuk disabilitas tunanetra, untuk di kampusnya sendiri, *blindingblock*-nya kurang memadai karena tidak sesuai standar dan masih banyak jalan yang menyesatkan tunanetra dalam berjalan, dan kurang aksesibel, seperti tempat yang sering dikunjungi oleh mahasiswa itu sendiri, seperti perpustakaan masih tidak aksesibel jalannya. Dan untuk kebijakan masih harus diperbaiki karena masih banyak yang kurang dari UPI." (wawncara, 2025).

**Evaluasi Implementasi Pendidikan Inklusif dan Rekomendasi di UPI**

UPI sudah berusaha membuat kampus inklusif, seperti dengan membuat pusat layanan disabilitas dan menerima mahasiswa disabilitas di berbagai program studi. UPI juga menyediakan jalur pemandu khusus untuk penyandang disabilitas di seluruh kampus, baik di luar maupun di dalam gedung.



**Gambar 1.** Fasilitas Aksesibilitas Difabel di Dalam Gedung Fakultas UPI

Gambar 1 menunjukkan keberadaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di dalam

gedung fakultas UPI, berupa *guiding block* atau jalur pemandu yang terhubung langsung dengan akses lift. Fasilitas ini memungkinkan mahasiswa difabel, khususnya penyandang disabilitas netra dan disabilitas fisik, untuk melakukan mobilitas secara mandiri dan aman di dalam lingkungan gedung perkuliahan. Keberadaan *guiding block* yang menunjukkan arah lift mencerminkan upaya yang sudah baik dalam penyediaan akses fasilitas yang setara bagi seluruh warga kampus.



**Gambar 2.** Fasilitas Aksesibilitas Difabel di Area Luar Gedung UPI

Gambar 2 juga memperlihatkan fasilitas aksesibilitas berupa *guiding block* atau jalur pemandu bagi penyandang disabilitas yang berada di area luar gedung di lingkungan UPI. Jalur ini berfungsi sebagai sarana penunjang mobilitas mahasiswa difabel dalam mengakses ruang publik kampus, seperti trotoar, jalan penghubung antargedung, dan area aktivitas luar ruangan. Keberadaan fasilitas ini menunjukkan adanya kesadaran institusi terhadap pentingnya aksesibilitas yang berkelanjutan, tidak hanya di dalam gedung, tetapi juga di ruang terbuka kampus.

Namun, penerapan pendidikan inklusif di UPI belum merata di semua fakultas. Program studi yang terkait langsung dengan pendidikan khusus lebih siap mendukung mahasiswa disabilitas dibandingkan yang lain. Penerapan yang belum optimal disebabkan oleh kurangnya pelatihan khusus untuk semua dosen, fasilitas pendukung yang terbatas, dan sosialisasi yang kurang tentang konsep serta praktik pendidikan inklusif kepada civitas akademika. Ini membuat penerapan nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan dan keadilan sosial, belum maksimal dalam pendidikan di kampus.

Berikut tanggapan langsung dari dosen dan mahasiswa disabilitas terkait evaluasi dan rekomendasi penerapan pendidikan inklusif di UPI, “pemerataan fasilitas, pelatihan untuk dosen, kalo setiap prodi mengeluarkan perwakilan untuk mengikuti pelatihan inklusif.” (wawancara, 2025), "Peraturan lebih diperketat dan diperbaiki lagi dan bisa dikonsultasikan pada ahli bidang pendidikan khusus, dan peraturan tidak hanya di atas kertas saja tapi juga diimplementasikan sebagaimana seharusnya, dan bagi petinggi UPI dalam membuat peraturan lebih rinci dan lebih adil dalam membuat suatu terobosan dalam peraturan, dan jangan hanya retorika dan di atas kertas saja peraturan nya, berikan luang dan ruang yang lebih untuk para disabilitas itu bisa merasa diterima dan berkembang." (wawancara, 2025).

Adapun tanggapan seorang mahasiswa non-disabilitas mengenai hal ini adalah berikut:
Saya berharap UPI bisa menerima akumulasi fasilitas untuk teman-teman disabilitas, khususnya di ranah akademik, seperti tuna netra butuh pendamping awas di saat perkuliahan untuk menjelaskan hal-hal yang kurang jelas (seperti gambar dalam *powerpoint* atau saat membantu mengerjakan tugas), karena meskipun kami selalu mencoba untuk membantu, cuman karena kami sesama mahasiswa jadi terkadang kami memprioritaskan tugas kami terlebih dahulu, jadi teman kami yang tunanetra itu menunggu kami sampai tugas kami itu selesai dulu, dan itu kan lumayan kurang efektif ya. Dan untuk teman tunarungu itu pastinya disediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI), agar teman kami tidak kebingungan jika suatu saat teman kami yang biasa mendampingi nya berhalangan hadir. Lalu mengenai aksesibilitas mungkin bisa diakumulasikan lagi, seperti tunadaksa rem yang ada agar benar-benar fungsional dan bisa diakses oleh mereka, begitu juga *guiding block*, karena kalau sesuai standar itukan *guiding block* itu harus kontras, antara warna *guiding block* dengan warna lantai, itu mungkin yang harus diperhatikan, tanda ruangan *braille*, dan *screen reader*. Semoga kedepannya bisa mengadakan pelatihan atau standar yang harusnya dilakukan oleh prodi atau jurusan seperti apa. Kalau semisal UPI sudah menerapkan bahwa dia adalah kampus inklusif, seharusnya seluruh warga UPI sudah diberikan sosialisasi terkait bagaimana menghadapi dan mengurus mahasiswa disabilitas. (wawancara, 2025)

## 5. Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia memahami dan mengakui Pancasila sebagai fondasi moral dalam membangun pendidikan inklusif. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan bahwa nilai-nilai moral dan sosial yang menjadi dasar pembentukan karakter bangsa berakar pada

Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa (Ni'mah et al., 2025). Pancasila dimaknai sebagai jaminan atas penghormatan terhadap hak dan martabat bagi mahasiswa disabilitas, sedangkan bagi para dosen dan mahasiswa non-disabilitas, pancasila berperan sebagai pedoman dalam membangun sikap saling menghormati dan kebersamaan.

Implikasi teoretis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif seharusnya berlandaskan nilai-nilai yang fundamental. Pendidikan inklusif bukan hanya sebuah struktur administratif dalam suatu institusi, tetapi didalamnya terkandung banyak sekali nilai-nilai yang dijadikan dasar dalam praktik pedagogis pendidikan inklusif. Penelitian ini menemukan kebaruan dari penelitian sebelumnya bahwa nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila seperti nilai keadilan dan kemanusiaan merupakan landasan utama dalam mengembangkan pendidikan inklusif di perguruan tinggi.

Secara teoretis, penelitian ini menempatkan nilai sebagai kerangka yang memandu kebijakan dan praktik pembelajaran kampus dengan konsep inklusif sebagai kontribusi dalam pengayaan kajian pendidikan inklusif berbasis nilai. Oleh karena itu, pendidikan inklusif merupakan wadah untuk membentuk lingkungan pendidikan yang berkeadilan dan bermartabat yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak akses bagi mahasiswa disabilitas tetapi juga sebagai tempat untuk mengimplementasikan nilai keadilan dan kemanusiaan bagi seluruh warga kampus.

Temuan ini juga menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh internalisasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam lingkungan pendidikan (Biantoro, 2024). Namun demikian, adanya kesenjangan antara pemahaman normatif terhadap Pancasila dan implementasinya yang ditunjukkan oleh tidak optimalnya penerapan nilai keadilan sosial dalam pemenuhan hak akademik mahasiswa disabilitas juga menjadi salah satu temuan dalam penelitian ini. Sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Sari et al. (2022) yang menyoroti belum meratanya penerapan inklusivitas di perguruan tinggi.

Salah satu faktor penting dalam lingkungan kampus inklusif adalah dukungan sosial yang diberikan oleh seluruh civitas akademika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa disabilitas mulai merasakan perkembangan dukungan instrumental, emosional, dan akademik yang didapat dari lingkungan kampusnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Isnawati et al. (2025) yang menyebutkan bahwa dukungan sosial berperan signifikan dalam meningkatkan rasa diterima dan kesejahteraan psikologis mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi.

Namun, masih terdapat beberapa civitas akademika yang belum memahami cara berinteraksi dan memberikan bantuan secara tepat sehingga dukungan sosial pun belum terbangun secara sistematis. Berdasarkan penelitian dari Asmiati et al. (2023) kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap disabilitas merupakan salah satu kendala dalam sistem pendidikan inklusif yang tidak hanya menyebabkan kurangnya dukungan tetapi juga menyebabkan kendala dalam penyediaan akses untuk disabilitas. Kondisi ini mencerminkan bahwa pendidikan inklusif tidak cukup hanya mengandalkan niat baik individu, tetapi membutuhkan pemahaman bersama kompetensi sosial yang memadai (Juntak et al., 2023). Dalam konteks nilai Pancasila, kondisi ini menunjukkan bahwa nilai persatuan dan kemanusiaan belum sepenuhnya diimplementasikan secara merata di lingkungan kampus.

Berdasarkan hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini, terlihat jelas bahwa pendidikan inklusif di perguruan tinggi masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Diantara hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan media pembelajaran, fasilitas khusus disabilitas, dan kurangnya kesiapan dosen serta satuan tenaga pendidik dalam membantu pembelajaran khusus mahasiswa disabilitas seperti yang dijelaskan juga dalam penelitian dari Isnawati et al. (2025). Hal ini menunjukkan bahwa masih belum terpenuhinya kebutuhan beragam mahasiswa secara menyeluruh dalam penerapan pendidikan inklusif, terutama di lingkungan kampus.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa masih lemahnya implementasi keadilan sosial dalam penyelenggaraan pendidikan yang disebabkan oleh kampus yang belum memberikan fasilitas aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas dengan sempurna. Padahal, kurangnya fasilitas aksesibilitas juga dapat berdampak pada tingkat kemandirian penyandang disabilitas, baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pengunjung lainnya, dalam menjalan aktivitas akademik dan sosial sehari-hari di lingkungan kampus (Nisa, 2025). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan inklusif bukan semata persoalan pedagogis, tetapi juga persoalan kebijakan dan komitmen dalam penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan secara menyeluruh.

Komitmen institusional terhadap pendidikan inklusif ditunjukkan oleh adanya pembentukan pusat layanan disabilitas dan penerimaan mahasiswa disabilitas sebagai upaya UPI dalam membangun kampus inklusif. Namun, kebijakan inklusi belum terintegrasi secara menyeluruh karena belum meratanya kebijakan ini di seluruh fakultas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Biantoro (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif di perguruan tinggi sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan kesiapan sumber daya manusia.

Ketidakmerataan implementasi kebijakan inklusi diantara sebabnya adalah perbedaan pemahaman dosen terhadap hal ini. Sebagai contoh, dosen dan mahasiswa pada jurusan pendidikan khusus pasti jauh lebih memahami terkait kebijakan inklusi dan mendorong upaya implementasinya dalam lingkungan kampus. Karena pada jurusan tersebut dosen dan mahasiswa sudah teredukasi dengan baik bagaimana cara belajar para mahasiswa disabilitas. Di sisi lain, dosen dan mahasiswa pada jurusan lain mayoritas belum pernah mendapatkan pelatihan dosen secara khusus ataupun sosialisasi mahasiswa mengenai kebijakan inklusi dan cara implementasinya, ditambah dengan tidak adanya ilmu dasar yang dimiliki terkait hal ini. Pada akhirnya, hal itu lah yang menyebabkan ketidakmerataan implementasi kebijakan inklusi.

Implikasi praktis dari penelitian ini dilihat dari kurang optimalnya penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sehingga sangat diperlukan kebijakan kampus yang lebih holistik dan berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan. Perguruan tinggi perlu mengadakan sosialisasi dan juga pelatihan khusus kepada warga kampus secara sistematis dan menyeluruh, agar seluruh warga kampus bisa memahami dan mengimplementasikan kebijakan inklusif secara merata.

Selain itu, perbaikan fasilitas ramah disabilitas juga sangat diperlukan sebagai bentuk penguatan kebijakan kampus, sehingga pendidikan inklusif dapat terimplementasikan secara nyata dalam praktik akademik sehari-hari. Dengan demikian, warga kampus dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kampus dan mendukung terciptanya kampus inklusif.

## 6. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan Pendidikan inklusif di UPI telah menjadi landasan utama dan mulai diwujudkan dalam kegiatan akademik serta sosial di lingkungan kampus. Nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial berperan penting dalam membangun interaksi inklusif, terutama melalui dukungan dan kepedulian civitas akademika terhadap mahasiswa disabilitas. Namun, penerapan nilai-nilai tersebut masih belum optimal dan merata, khususnya dalam pemenuhan hak akademik serta penyediaan fasilitas dan layanan yang benar-benar aksesibel bagi mahasiswa disabilitas. Penelitian ini mengungkap hubungan antara perspektif nilai Pancasila dengan pengalaman langsung mahasiswa disabilitas, serta peran civitas akademika dalam mendukung pendidikan inklusif, yang menjawab tujuan penelitian untuk mengevaluasi praktik sehari-hari dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas pengetahuan mengenai kajian pendidikan inklusif yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dengan melengkapi penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek kebijakan, melalui gambaran praktik sehari-hari dan tantangan nyata. Secara praktis, temuan ini memberikan bahan evaluasi untuk pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di perguruan tinggi, serta menegaskan pentingnya pendekatan menyeluruh untuk menciptakan pendidikan tinggi yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

Untuk penguatan Pendidikan inklusif, diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup penyempurnaan kebijakan universitas, peningkatan kemampuan dosen, serta pembiasaan nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi strategi implementasi spesifik di universitas lain, mengukur dampak jangka panjang terhadap inklusi mahasiswa disabilitas, serta mengintegrasikan perspektif mahasiswa non-disabilitas dalam analisis interaksi sosial untuk memperdalam pemahaman praktik inklusif.

## 7. Persembahan

Penelitian ini didukung penuh oleh Allah Ta’ala, seluruh rekan-rekan angkatan 2025 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UPI, serta dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UPI kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Ta’ala serta terima kasih kepada rekan-rekan angkatan 2025 dan dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UPI yang telah memberikan dukungan, wawasan, dan keahlian yang sangat membantu penelitian ini.

## 8. Referensi

Asmiati, N., Abadi, R. F., & Mulia, D. (2023).

Analisis terhadap aksesibilitas lingkungan fisik untuk mahasiswa disabilitas di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. *7*(2), 103–107.

Biantoro, O. F. (2024). Pendidikan inklusif di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS), 2*(1), 24–33. doi:10.38073/aijis.v2i1.1697

Isnawati, D., Zakaria, R. A., & Pratomo, L. C. (2025). Hambatan pendidikan inklusif: Menelusuri akar permasalahan implementasi di Indonesia. *Jurnal Unik: Pendidikan Luar Biasa, 10*(1), 57–66.

Juntak, J. N. S., Rynaldi, A., Sukmawati, E., Arafah, M., & Sukomardojo, T. (2023). Mewujudkan pendidikan untuk semua: Studi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 5*(2), 205–214. doi:10.15575/jbpd.v5i2.26904

Ni, F., Machsunah, Y. C., & Rachma, E. A. (2025). Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam membentuk etika sosial siswa kelas XII MA Miftahul Jinan. November, 9637–9643.

Nisa, K. (2025). Towards an inclusive campus: Exploring the physical and non-physical challenges for students with disabilities in higher education. *4*(2), 233–246.

Sari, Z. P., Sarofah, R., & Fadli, Y. (2022). The implementation of inclusive education in Indonesia: Challenges and achievements. *Jurnal Public Policy, 8*(4), 264. doi:10.35308/jpp.v8i4.5420



© 2026 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).